

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Artadi, I Ketut. 2016. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Artika, I Wayan. 2003. *Incest*. Yogyakarta: Interpre Book.
- Friedman, Lawrence Meir. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Hardikusumo, Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Prasetyo, Yanu Endar. 2010. *Mengenal Tradisi Bangsa*. Yogyakarta: PT Grammedia.
- Rivai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2014. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsini, Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Surpha, I Wayan. 2004. *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Windia, Wayan P. 2013. *Hukum Adat Bali Dalam Tanya Jawab*. Denpasar: Bali Shanti, Udayana University Press.

Zainudin, Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL/ARTIKEL

Adnyani, K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 11(1), 47-64.

Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1).

Adnyani, N. K. S., Windari, R. A., & Yuliantini, N. P. R. (2016, November). PUTUSAN DESA ADAT SEBAGAI LEGITIMASI MASYARAKAT ADAT TERHADAP PERKAWINAN NYENTANA DI KABUPATEN TABANAN. In *Seminar Nasional Riset Inovatif* (Vol. 4).

Antari, K. W., Windari, R. A., & Mangku, D. G. S. (2020). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANTYNOMY NORMEN (KONFLIK NORMA) ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR-DASAR POKOK AGRARIA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERKAIT JANGKA WAKTU PEROLEHAN HAK ATAS TANAH. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 51-60

Arunde, R. M. M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 6(2).

Devi, I. M. S., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA DEPEHA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(2), 371-380.

Dewi, I. G. A. A. C. (2018). Manak Salah Dalam Tradisi Lokal Di Desa Pakraman Julah Kabupaten Buleleng. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 1(1), 49-68.

Ningrat, K. A. J., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Perkawinan Ngerorod Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 201-210.

Sudantra, I. K., & Laksana, I. G. N. D. (2017). Pluralisme Hukum Yang Berlaku dalam Perkawinan Umat Hindu di Bali. In *Prosiding Seminar Sains & Teknologi IV*.

Yasa, I. N. (2010). Tesis, Antitesis, dan Sintesis Eksistensi Kembar Buncing dalam Novel Incest Karya I Wayan Artika. *PRASI*, 6(11).

Yuliantini, N. P. R. (2010). ANAK TIDAK SAH DALAM PERKAWINAN YANG SAH (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (4-131/2019), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

Awig-Awig Desa Adat Bonyoh

